

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan menuju tujuan pembangunan nasional.¹

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar dan tujuan serta pedoman pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan merata dan mencakup semua aspek, di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, termasuk pembangunan daerah yang mana hasil-hasil pembangunan tersebut harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang berupa kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya antara manusia dan lingkungan adalah satu bangunan yang berdiri saling menguatkan, dimana manusia itu tergantung dengan lingkungan begitu pula sebaliknya, lingkungan itu tergantung dengan aktivitas kegiatan manusia. Namun bila dari sisi manusia, maka lingkungan amat tergantung dengan aktivitas kegiatan manusia memanfaatkannya.

Problem lingkungan semakin dirasakan oleh umat manusia. Gejala umum yang menonjol adalah kerusakan berbagai ekosistem atau hilangnya berbagai spesies flora dan fauna, pencemaran air, tanah dan udara, serta dampak lainnya. Bahkan masalah lingkungan ini berkembang lebih lanjut tidak hanya mencakup aspek ekologi tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum hingga solusinya juga secara komprehensif dan keterlibatan banyak pihak dan kelembagaan.

Dalam era Reformasi telah terjadinya transformasi dari kekuasaan pemerintahan secara sentralistik menuju pemerintahan yang baik dengan berlakunya desentralisasi, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan ini memiliki potensi saling ketergantungan antar berbagai aspek kehidupan yaitu, politik, social ekonomi dan budaya, serta lingkungan yang perlu diantisipasi secara seksama dan holistic.

Dalam konteks otonomi daerah, dimana penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka jelas bahwa masyarakat di daerah memegang peran yang sangat penting,. Oleh karena itu

.

produksi bijih timah sebanyak 21.468,59 Ton Sn. Produksi bahan galian golongan C di Kabupaten Bangka pada tahun 2003 produksi kaolin 13.867 Ton, pasir kuarsa 450.382,6 Ton, granit 24.200 Ton, tanah liat 29.888,91 ton dan pasir bangunan 21.024 ton.²

Munculnya TI (Tambang Inkonvensional) di Kabupaten Bangka, awalnya dipicu oleh turunnya harga timah di pasar dunia hingga di bawah 4.000 dollar AS pada September 2001, jatuhnya harga ini mengakibatkan PT. Timah merugi sehingga potensi cebakan (galian tambang) timah darat pada wilayah PT Timah yang dianggap tak ekonomis jika dikerjakan sendiri diborongkan penambangannya kepada kontraktor lokal (tambangn karya/TK). Krisis moneter 1997 yang dibarengi dengan jatuhnya harga berbagai komoditas unggulan lokal, seperti lada dan karet, juga memaksa masyarakat petani Babel beralih ke kegiatan yang dianggap akan lebih mampu menopang keberlanjutan hidup mereka, terutama dengan terjun ke TI.³

Pemerintah Daerah (pemda) yang menyadari masalah akibat menjamurnya TI mengalami kesulitan mengatasi masalah itu. Kesulitan terjadi karena pertambangan timah rakyat merupakan kasus khusus yang sulit diatur oleh undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum. Kesulitan lain yang muncul karena tumbuhnya industri peleburan timah atau *smelter*. Smelter muncul karena ada larangan ekspor pasir timah pada tahun 2002. karena tidak ada peraturan khusus untuk mengatur kasus

² Bangka dengan angka 2002, *kerja sama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bangka.*

³ Kompas, sabtu, 14. Oktober 2006

pertambangan semacam itu, setiap pemerintah kabupaten dan provinsi membuat peraturan daerah masing-masing untuk melegalkan usaha itu.

Dengan disahkannya peraturan daerah mengenai Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, pemerintah provinsi Bangka Belitung sudah ambil langkah-ancang untuk segera melakukan penertiban tambang timah tanpa izin. Tim penambangan timah tanpa izin (peti) yang sebenarnya terbentuk sejak tahun 2003 sudah memulai rapat koordinasi. Namun, rencana pemda untuk menertibkan usaha pertambangan dan pengelolaan timah secara terpadu tampaknya akan menghadapi banyak kendala. Dalam hal ini pemda memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan perda yang berlaku, seperti Perda Kabupaten Bangka No.6 tahun 2001. pemerintah juga telah berusaha untuk menghambat penyelundupan lewat peraturan larangan perdagangan pasir timah antar pulau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis akan mengumumkan permasalahannya sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Perda No.6 tahun 2001 tentang pengelolaan

11. Dina, Pertambangan dan Energi Kabupaten

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah dasar pemikiran yakni suatu uraian yang menjelaskan variable dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep, defenisi tertentu, atau menjelaskan variabel dan kaitannya seperti yang dirumuskan dalam perumusan masalah sehingga dapat membantu kita dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian dalam memilih konsep yang tepat.

Untuk yang paling dan besar peranannya dalam suatu penelitian adalah teori, karena dengan unsur inilah penulis akan menjelaskan tentang yang terdapat dalam perumusan masalah.

Pendapat Bogdan dan Biklen mengenai teori :

Teori adalah kumpulan longgar tentang asumsi satu sebuah set konsep atau construct yang berhubungan satu dengan yang lainnya, satu set dari preposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.⁴

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Miftah Thoha, dalam arti luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain :

- a. *Policy* merupakan praktis social, ia bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
-

- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh, baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan "*insentif*" bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* pada satu pihak dapat terbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.⁵

Selain itu Carl J. Fredrick mengatakan *policy* adalah :

"It is essential for the policy concept that there be a goal objective or purpose"

artinya adalah amat mendasar bagi konsep kebijakan terdapatnya suatu tujuan sasaran atau keinginan.⁶

Dari beberapa pengertian kebijakan diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan Negara itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat banyak atau masyarakat, maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah :

"Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukannya oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat".

⁵ Mifta Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 57-58

menunjang upaya kelestarian lingkungan dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Pertambangan dan penggalan merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Bangka. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan. Berbagai cara dilakukan dan kebijakan dibuat agar tetap berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi baik melalui pemanfaatan sumber daya alam, intensifikasi penggunaan lahan maupun industrialisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus ditebus dengan rusaknya sumber daya alam apalagi kabupaten Bangka yang selama ini penopang laju pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari sumber daya alam khususnya tambang timah dan bahan galian golongan C seperti kuarsa dan kaolin.

Sektor pertambangan di Pulau Bangka pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumberdaya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pulau Bangka yang lebih dikenal dengan pulau timah dan penghasil timah terbesar di dunia. Dampak penambangan timah di Bangka di samping penambangan lainnya seperti pasir kuarsa pasir bangunan dan kaolin yang paling menonjol adalah terdapatnya kolong-kolong (lubang besar) bekas galian yang menyerupai danau, dan kerusakan hutan. Produksi Pengolahan bijih timah (logam timah) di Kabupaten Bangka pada tahun 2003 sebanyak 3.868,81 Ton, sedangkan

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperhatikan hasilnya. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, *kamus Websteri* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah executive atau dekrit presiden).

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intend*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Implementasi dapat pula dilihat dari sudut kelompok sasaran,

melestarikan kualitas lingkungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan baru yang dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan untuk menghindarkan dari rusaknya lingkungan.⁷ Kelompok sasaran itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan aktivitas pengelolaan pertambangan dalam mengatasi permasalahan pencemaran lahan di Kabupaten Bangka. Pemahaman yang mendalam terhadap sasaran ini amat penting artinya bagi peraturan pemerintah, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi perilaku (*behavioral assumption*) yang mendasari penyusunan setiap program. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design stage*) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Mazmania dan Sabatian telah merumuskan proses implementasi kebijakan ini dengan lebih rinci :

“implementasi adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan executive yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai dan

⁷ F. Gunawan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, Hal 9

serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam usaha untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik tersebut perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan kebijakan publik implementasi. Kebijakan publik banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi namun demikian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar birokrat namun demikian, disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh isi atau muatan kehidupan publik itu sendiri, dan konteks politik atau karakter rezim serta sistem politik yang ada. Seperti yang dicontohkan oleh berbagai negara, dimana penerapan suatu kebijakan publik gagal karena isi kebijakan yang kurang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Disamping itu juga kegagalan tersebut dikarenakan konteks politik yang ada yang cenderung mementingkan sekelompok orang atau elit ditingkat kekuasaan untuk mengambil keuntungan ekonomi atau kelompoknya dalam kebijakan tersebut. Jadi keberhasilan implementasi kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh isi (content), kebijakan itu sendiri dan kinerja birokrasi dalam sistem politik.

2) Metode pendekatan dan penelitian kinerja kebijakan implementasi

ini merujuk kepada pemikiran Paul A. Sabatier yaitu :

“Penelitian dimulai dari suatu keputusan kebijakan pemerintah dan serangkaian kebijakan pemerintah pusat diambil oleh para pejabat”.

Penelitian ini bermula dari keputusan kebijakan publik yang telah diambil oleh para pejabat yang berwenang kemudian menanyakan prosedur pelaksanaan dampak kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan itu dengan kontribusi pengalaman lapangan pelaksanaan kebijaksanaan bagi reformulasi kebijakan tersebut. Analisis kebijaksanaan adalah penilaian dari proses kebijakan yang berkaitan dengan dua hal yaitu, pertama isi kebijakan dan yang kedua lingkungan atas sistem politik yang ada.⁹

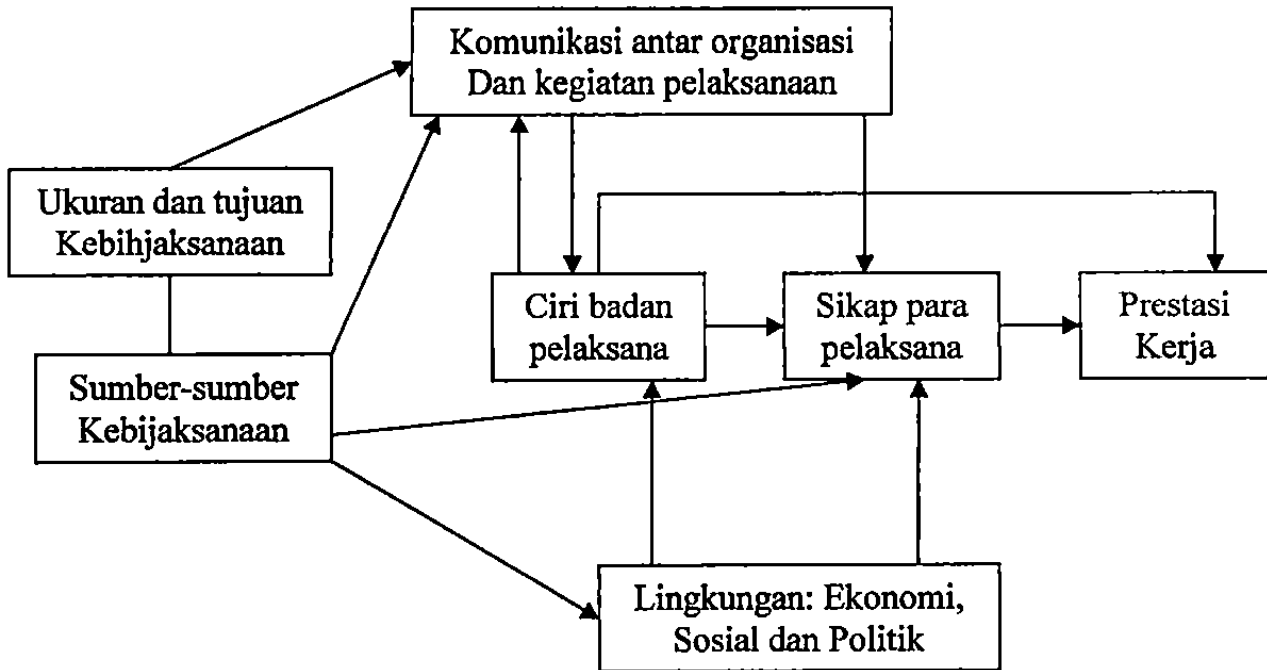
b. Model-model implementasi kebijakan Negara

Sekalipun dalam khasanah ilmu kebijakan Negara atau analisis kebijakan Negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijaksanaan, namun beberapa model implementasi kebijaksanaan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran atau tulisan para ahli.

- 1) Menurut **Hogwood dan Gounn** untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.

⁹ Ulung Pribadi, Drs, *Implementasi Kebijakan Kesehatan*, Program Bidan Desa, Program Pasca Sarjana USM, 1998, hal 8

Gambar Model Proses Implementasi



Sumber : D.S Van Meter and Van Horn, The Policy Implementation Process: A conceptual Framework, Administrasi and Society, 1975, hal 445-448

Gambar struktur atau pola kerja diatas menjelaskan tentang system atau proses dimana implementasi dirancang dan diterapkan pada tingkatan teknis dilapangan. Secara deskriptif komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan merupakan cirri dari badan pelaksana dimana dapat dijadikan sebagai ukuran dan ukuran kebijakan yang merupakan sebagai sumber-sumber kebijakan, atau sebaliknya setelah melalui sebuah tahapan atau kajian komunikasi antar organisasi dari kegiatan pelaksanaan dapat juga sebagai ciri badan pelaksana setelah menerima masukan, dan

menjadi sebuah prestasi kerja, dalam pola kerjanya ada saling berhubungan antara cirri badan pelaksana, sikap para pelaksana, dan prestasi kerja, adapun tanpa melalui sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan cirri badan pelaksana dapat langsung dikatakan prestasi kerja, semua ini tidak terlepas masukan sektor lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan sumber-sumber dari kebijaksanaan dan dapat dikatakan sebagai sikap para pelaksana setelah menganalisa semua permasalahan yang timbul dan terjadi.

- 3) Model yang dikembangkan oleh **Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier**, yang disebut *A Frame Work For Implementation Analysis* (kerangka kerja untuk implementasi Analisis), kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.¹⁰

Dari ketiga model-model implementasi diatas yang akan digunakan adalah yang ketiga karena dalam proses implementasinya mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasinya beserta faktor-faktor yang akan mendukung dalam pelaksanaannya.¹¹

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan, tercapainya atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program itu sangat tergantung bagaimana adanya faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung itu ada yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung itu adalah :

- (a) Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- (b) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai
- (c) Hubungan ketergantungan harus kecil
- (d) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- (e) Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- (f) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- (g) Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari oleh suatu kualitas yang handal.

Implementasi kebijakan yang operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terhadap dua unsure pendukung yang penting dan mutlak yaitu adanya : (1) Program yang dilaksanakan, (2) target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program dan

jawab dalam pengelolaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.¹²

Setiap implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat.

Efisiensi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya atau dana yang dikeluarkan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Keputusan kelompok sasaran inilah yang memberikan nilai arti pada pelaksanaan program karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan dan sering timbul semacam pertanyaan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dari pelaksanaan kebijakan itu dan sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Isi kebijakan yang menyebabkan kegagalan dari suatu pelaksana kebijakan terjadi karena samar-samarnya isi dari kebijakan, dalam arti tujuan-tujuan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan

¹² Abdul M Syukur, *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi*, Pusdiklat pegawai Negeri RI,

kurangnya pegangan bagi pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan dari isi kebijakan.

Selain itu kebijakan yang hendak dijalankan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan yang lain. Yang merupakan salah satu sebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain : waktu, uang dan ahli.

Mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi di antara actor-aktor yang terlibat, struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini terjadi apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Amir Santoso mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan hasilnya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktifitas komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya.¹³

Menurut Edward 3 (tiga) dasar uraian tersebut dapat disimpulkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan

faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai.¹⁴

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Tersedianya komunikasi adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan kebijakan terutama bagi aparat pelaksana sehingga akan diketahui apa yang harus dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dana atau intensif lain yang akan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi/sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu proyek.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga struktur birokrasi ini harus jelas.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik di sekitar, atau habitat-habitat dari organisme, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora dan fauna baik di kehidupan air maupun darat yang selalu

¹⁴ Ibid

berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi maupun mempertahankan kehidupan dari faktor yang merusak kehidupan ekosistem.

Persoalan lingkungan mencakup dua hal, yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan (Pasal 1 butir 7 dan 8 UULH).¹⁵ Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan dan berubahnya tatanan lingkungan turun. Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tindakan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Untuk selanjutnya ini akan mencakup permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari kerusakan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyakit-penyakit lingkungan. Respon yang bersifat organisasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup dan diikuti dengan diundangkannya peraturan

perundang-undangan serta pembentukan organisasi lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁶

Persoalan lingkungan hidup mencakup dua hal, yakni pencemaran dan eksploitasi.

Dalam UUPH Pasal 1 butir 12 menyatakan :

“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Instrumen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Menurut Peraturan Pemerintah No.29/1986, yang memiliki satu model AMDAL mempunyai pengertian :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

2. Analisis Dampak Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam peraturan pemerintah No.51/1993 dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL proyek individual (seperti PP No.29/1986) AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Pengertian ketiga AMDAL tersebut adalah :

- 1) AMDAL Kegiatan Terpadu, multi sector adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
- 2) AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab.
- 3) AMDAL Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi bertanggung jawab.¹⁷

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Bangka. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan. Berbagai cara dan kebijakan dilakukan agar tetap berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi baik melalui pemanfaatan sumber daya alam, intensifikasi penggunaan lahan maupun industrialisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mungkin harus ditebus dengan rusaknya sumber daya alam apalagi Kabupaten Bangka yang selama ini penopang laju pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari sumber daya alam khususnya tambang timah dan bahan galian golongan C seperti kaolin dan kuarsa.

¹⁷ Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pemananannya dalam*

D. Defenisi Konsepsional

Adalah bahwa dalam tahapan ini berusaha menjelaskan pengertian suatu konsep dengan konsep lain yaitu :

1. Kebijakan

Kebijakan (*public policy*) adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh seorang atau kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk didalamnya adalah upaya menstransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

3. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik disekitar, atau habitat dari organisme, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora maupun fauna baik di lingkungan air maupun darat yang selalu berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi ataupun mempertahankan dari

E. Defenisi Operasional

Suatu penelitian dapat diukur maka variabelnya perlu dioperasikan. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. Indikatornya :

1. Isi Peraturan Daerah Mengenai Perizinan.
 - a. Perizinan
 - b. Luas dan Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
2. Kejelasan terhadap kebijakan perizinan pertambangan rakyat.
 - a. Kesesuaian antara aturan-aturan kebijakan dengan aturan-aturan pelaksanaan
 - b. Terlaksananya misi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan pertambangan .

3. Kondisi Lingkungan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kec. Sungailiat yang ikut mempengaruhi sikap terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pertambangan . .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat

..... metode dalam peneliti

sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa.¹⁸

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Di dalam melakukan penelitian penulis memilih pada propinsi kepulauan Bangka sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki lokasi pertambangan seperti di daerah-daerah lain dan permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Gejala masalah lingkungan sifatnya kait-mengait dan bersumber pada suatu rangkaian masalah pokok, yaitu dinamika kependudukan, pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta benturan terhadap tata lingkungan.

Selain itu pemilihan lokasi karena disebabkan fenomena yang ada cukup memerhatikan dan masalah ini tidak dapat dipecahkan hanya dari kacamata seorang ahli ekologi saja ataupun ahli lainnya dari satu

¹⁸ Nasir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), hal.63

keseluruhan yang bulat. Sebagai masalah bersama umat manusia karena hidup mungkin tergantung satu dengan yang lain.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang kompeten atau terkait dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah Dinas Pertambangan dan Energi. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sumber data primer akan diwawancara secara mendalam guna mendapatkan data-data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder berupa buku pedoman dan arsip-arsip yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda No.6 dan lingkungan pertambangan.

4. Unit Analisa Data

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Pertambangan dan Energi di Bidang pengawasan yang terdiri dari :

- Seksi pengawasan teknik, peralatan, produksi dan wilayah usaha
- Seksi pengawasan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

Sebagai badan yang mengawasi serta paling mengetahui tentang permasalahan pertambangan.

oleh situasinya. Dalam hal ini situasinya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Data diperoleh dari catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian di
11-1-2014 ini karena sumber data adalah Dikti, Dinas Pertambangan dan